

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia di samping menyelenggarakan pemerintahan juga melaksanakan pembangunan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menaikkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun manusia, bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan program, berkesinambungan dan terkait secara serasi dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya. Pembangunan dapat tercapai apabila didukung oleh sumber daya dan penerimaan negara yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas meliputi penerimaan perpajakan dan bukan pajak. Setelah penerimaan dari hasil-hasil minyak bumi sekarang kurang dapat diandalkan lagi untuk memegang peranan utama dalam penerimaan negara.

Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat,

namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah. Ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan.

Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak pada terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80% dari seluruh penerimaan Negara (Asri dan Vinola, 2007). Penerimaan pajak pada 2011 mencapai Rp872,6 triliun atau 99,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan senilai Rp878,7 triliun. "Dibandingkan realisasi 2010, maka realisasi penerimaan tahun ini naik sebesar Rp149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6 %. (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan). Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) pada 2011 mencapai 12,3 persen naik sebesar 1 persen dari PDB dibandingkan dengan tax ratio tahun sebelumnya, sebesar 11,3 persen. (Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak). Hal ini membuktikan sebagian besar penerimaan-penerimaan negara berasal dari pajak. Mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang tetap berlanjut, maka diperkirakan penerimaan PPh masih bisa diharapkan dapat meningkat.

Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20%, dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12%

untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk kabupaten/kota dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. Rincian alokasi sementara dana bagi hasil Kabupaten Sukoharjo tahun 2012 untuk Pajak Penghasilan WPOPDN sebesar Rp 912.163.942 dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 16.363.162.043 (Menkeu RI, no.203/PMK 7/2011).

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah oleh karena itu kemampuan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah terhadap total APBD (Purbayu dan Retno, 2005). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo berasal dari Pos Pajak Daerah yaitu sebesar 36%, Pos Retribusi Daerah sebesar 47 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 10 % dari tahun anggaran 2009/2010 sebesar Rp 60.297.533.000 (APBD 2010). Dari APBN 2010, dapat dilihat bahwa Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah terbesar setelah Retribusi Daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan pernah dilakukan oleh Nouvel (2004), yang membahas tentang pengaruh dari variabel-variabel pendapatan perkapita, jumlah wajib pajak, derajat keterbukaan ekonomi, derajat moneterisasi dan pasal 17 UU Perpajakan tahun 2000 untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh (pasal 17 UU Perpajakan tahun 2000) terhadap penerimaan PPh di Surakarta dan untuk meramalkan penerimaan PPh

pada tahun 2004 di Surakarta. Data yang digunakan adalah data time series tahun 1994-2002

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak, derajat moneterisasi, derajat keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan Kabupaten Sukoharjo, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2003-2010”.

B. Perumusan Masalah

Peneliti memberikan perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010?
2. Apakah jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010?
3. Apakah derajat moneterisasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010?
4. Apakah derajat keterbukaan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan masalah yang telah diajukan untuk menganalisis secara empiris tentang:

1. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010.
2. Pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010 .
3. Pengaruh derajat moneterisasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010.
4. Pengaruh derajat keterbukaan ekonomi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kabupaten Sukoharjo periode 2003-2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini sebagai bahan dan informasi dalam pengambilan keputusan serta masukan bagi pemerintah dalam menentukan strategi, kebijaksanaan fiskal dan perpajakan.
2. Penelitian ini sebagai penerapan ilmu ekonomi yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam praktek kerja di lapangan.
3. Penelitian ini berguna sebagai bahan dan acuan dalam penelitian lebih lanjut, dan dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi UMS bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Sistematika Penulisan

- BAB I Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Merupakan landasan teori yang meliputi tentang pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, jenis-jenis pajak penghasilan, pendapatan perkapita, jumlah wajib pajak, derajat keterbukaan ekonomi, derajat moneterisasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran studi, dan hipotesis penelitian.
- BAB III Merupakan metode penelitian yang berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV Merupakan analisis data dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi variabel penelitian, analisis kuantitatif, dan interpretasi hasil regresi.
- BAB V Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN